KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Hari ini Bamus DPR tentukan nasib angket KPK
Tanggal : Kamis, 18 Mei 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

Hari Ini Bamus DPR Tentukan Nasib Angket KPK

JAKARTA - Nasib hak angket atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digulirkan sejumlah anggota DPR akan ditentukan hari ini.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyampaikan kelanjutan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket tersebut akan ditentukan melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) seusai sidang paripurna.

Dalam Bamus akan ditentukan bagaimana kelanjutan hak angket mengingat hingga saat ini belum ada satu pun fraksi yang mengirimkan nama anggotanya untuk duduk di pansus. "Sampai hari ini belum ada fraksi menyampaikan susunan anggota pansus angket. Belum ada yang masuk anggota dari kepanitiaan angket sehingga memang besok paripurna pembukaan, setelah itu mungkin sorenya rapat Bamus," kata Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Agus menjelaskan, apabila dalam rapat Bamus ada anggota atau fraksi yang mengirimkan nama anggotanya, barulah bisa dibentuk kepanitiaan angket. "Kalau belum ada tentu kita tidak bisa," ujarnya.

Untuk Fraksi Partai Demokrat, Agus menegaskan bahwa dari awal tidak menyetujui usul pembentukan hak angket.

Diketahui, DPR dalam sidang paripurna pada Jumat (28/4) menyetujui usulan pembentukan hak angket atas pelaksanaan tugas KPK yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang KPK.

Pembentukan hak angket dipicu keengganan KPK menuruti permintaan Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani yang disebutkan diancam oleh sejumlah anggota DPR jika membongkar kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP). Namun setelah diputuskan dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, gelombang penolakan dari DPR malah terus menguat.

Fraksi-fraksi di DPR secara tegas menyatakan sikapnya untuk tidak mendukung pembentukan hak angket KPK dan berjanji tidak akan mengirim anggotanya jika pansus tetap dipaksakan. Mereka adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara itu Fraksi Partai Gerindra berubah sikap soal hak angket atas KPK ini. Fraksi ini memutuskan akan mengirimkan perwakilannya ke pansus. Tujuannya untuk mengawal agar angket itu tidak berujung pada pelemahan KPK. Gerindra beralasan, dengan masuk atau tidak masuk ke pansus, pembentukan pansus itu tetap bisa dilakukan. Tidak ada aturan bahwa sebuah pansus angket harus terdiri atas seluruh perwakilan fraksi di DPR. "Begini, setelah dikaji dan disepakati bersama, ternyata pansus bisa jalan terus tanpa fraksi harus lengkap," kata Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid kemarin.

Dengan begitu, menurut dia, suatu kerugian jika Fraksi Partai Gerindra tidak mengirimkan utusan untuk masuk ke pansus tersebut. "Tapi Gerindra tetap konsisten menolak hak angket," papar Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

● **rahmat sahid/ sindonews**

PERPUSTAKAAN DPR-RI